



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2024



## SKIPM PADANG

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja (LKj) Tahun 2024 atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Padang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

LKj ini merupakan wujud pertanggungjawaban kepada stakeholder dan sebagai sarana akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban organisasi dan pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Disamping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Akhirnya kami berharap agar laporan kinerja ini dapat bermanfaat serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja organisasi Stasiun KIPM Padang.

Padang, 2 Januari 2025

Plt. Kepala,



**Ivonila Etris**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Profil Organisasi .....	2
1.3. Sistematika Penyajian .....	4
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>5</b>
2.1. Visi dan Misi .....	5
2.2. Tujuan .....	6
2.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja .....	6
2.4. Pengukuran Kinerja .....	9
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>11</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	11
3.1.1. Capaian Kinerja dibanding Target Tahunan .....	11
3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja 5 Tahun Terakhir .....	41
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Renstra .....	43
3.1.4. Analisa Faktor Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Capaian Kinerja .....	45
3.1.5. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	46
3.1.6. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Capaian Kinerja .....	49
3.2. Realisasi Anggaran .....	50

BAB IV. PENUTUP .....	52
LAMPIRAN .....	53

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Indikator Kinerja dan Target Kinerja SKIPM Padang Tahun 2024 ...	8
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Stasiun KIPM Padang Tahun 2024 .....	12
Tabel 3.2.	Capaian Sasaran Kegiatan 1 berdasarkan Indikator Kinerjanya .....	14
Tabel 3.3.	Ekspor Hasil Perikanan Stasiun KIPM Padang Tahun 2024 .....	22
Tabel 3.4.	Capaian Sasaran Kegiatan 2 berdasarkan Indikator Kinerjanya .....	24
Tabel 3.5.	Capaian Sasaran Kegiatan 3 berdasarkan Indikator Kinerjanya .....	27
Tabel 3.6.	Hasil Pemantauan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona ZI Menuju WBK/WBBM Stasiun KIPM Padang oleh Tim dari Sekretariat BKIPM .....	32
Tabel 3.7.	Rekapitulasi Tindak Lanjut Temuan Keuangan LK 2023 Lingkup KKP per 28 September 2024 .....	36
Tabel 3.8.	Tingkat Kepatuhan PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2024 .....	39
Tabel 3.9.	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup BPPMHKP Tahun 2024 .....	40
Tabel 3.10.	Perbandingan realisasi kinerja Stasiun KIPM Padang dalam 5 tahun terakhir (Tahun 2020 s/d 2024) .....	42
Tabel 3.11.	Perbandingan realisasi kinerja Stasiun KIPM Padang tahun 2024 dengan Renstra .....	44
Tabel 3.12.	Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2024 .....	47
Tabel 3.13.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil SKIPM Padang pada Tahun 2024 .....	48
Tabel 3.14.	Realisasi Anggaran Stasiun KIPM Padang Tahun Anggaran 2024 ...	50

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Stasiun KIPM Padang .....	3
Gambar 2.1.	Peta Sasaran Strategis SKIPM Padang Tahun 2024 .....	7
Gambar 3.1.	Dashboard Nilai Pencapaian Sasaran Strategis pada Aplikasi Kinerjaku KKP Tahun 2024 .....	11
Gambar 3.2.	Foto Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Perikanan .....	16
Gambar 3.3.	Hasil capaian IK Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu .....	26
Gambar 3.4.	Nilai SKM Stasiun KIPM Padang Tahun 2024 pada e-survey SKM BPPMHKP .....	29
Gambar 3.5.	Indek IP ASN SKIPM Padang pada Aplikasi Simpeg Biro SDMA KKP .....	30
Gambar 3.6.	Hasil penilaian mandiri SAKIP Level II oleh Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2024 .....	33
Gambar 3.7.	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Stasiun KIPM Padang Tahun 2024 pada Aplikasi Monev Kemenkeu - Smart DJA .....	34
Gambar 3.8.	Nilai IKPA Stasiun KIPM Padang Tahun 2024 pada Aplikasi OmSpan DJA - Kemenkeu .....	36
Gambar 3.9.	Nilai rekomendasai hasil pengawasan Stasiun KIPM Padang Tahun 2024 pada Aplikasi SIDAK .....	38

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Padang selama Tahun 2024. Capaian kinerja (performance results) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang pada akhir Tahun 2024 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) pada awal Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja. Secara umum, Stasiun KIPM Padang telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama Tahun 2024.

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang telah menetapkan target kinerja Tahun 2024 dalam bentuk Kontrak Kinerja antara Kepala Stasiun KIPM Padang dengan Kepala BPPMHKP yang sejalan dengan Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Target Kinerja Stasiun KIPM Padang yang terdiri dari 3 Sasaran Kegiatan (SK) dan 15 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Secara umum, Stasiun KIPM Padang telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama Tahun 2024. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dan indikator kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target indikator kinerja kegiatan Stasiun KIPM Padang pada Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan 1 yaitu Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan :
  - a. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang, target 70%, realisasi 100%, capaian 120%;

- b. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang, target 70%, realisasi 100%, capaian 120%;
  - c. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Padang, target 70%, realisasi 100%, capaian 120%;
  - d. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Padang, target 99%, realisasi 133,5%, capaian 120%;
2. Sasaran Kegiatan 2 yaitu Terselenggaranya pengendalian sistem dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar. IK untuk SK juga dapat tercapai dengan baik dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Padang dari target 70%, realisasi 83,10%, capaian 119%;
3. Sasaran kegiatan 3 yaitu Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT Stasiun KIPM Padang. Capaian IK untuk SK ini adalah sebagai berikut:
  - a. Indeks kepuasan masyarakat layanan UPT Stasiun KIPM Padang, realisasi adalah 4 dari target 3,36 yang ditetapkan, hal ini berarti capaian IKK adalah 119 %;
  - b. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Padang, target Triwulan IV 86, realisasi 87,58, capaian 101%;
  - c. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT Stasiun KIPM Padang, target 75, realisasi 83,61, capaian 111%;
  - d. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Padang, target 82, realisasi 82,80, capaian 101%;
  - e. Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Padang, target 71, realisasi 75, capaian 106%;

- f. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Padang, target 93,76, realisasi 96,49, capaian 103%;
- g. Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Padang, target 100%, realisasi 100%, capaian 100%;
- h. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Padang, dari target 80%, realisasi 100%, capaian 120%;
- i. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Padang, target 80%, realisasi 84,34%, capaian 105%;
- j. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun KIPM Padang; target 80%, realisasi 97,50%, capaian 120%.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang Tahun 2024 dengan 3 Sasaran Kegiatan dan 15 Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori capaian sasaran berhasil. Keberhasilan pencapaian tersebut diupayakan untuk semakin ditingkatkan, sedangkan untuk beberapa kegiatan yang belum terlaksana/terdapat permasalahan akan diupayakan untuk dapat diselesaikan.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas Stasiun KIPM Padang dan menjadi umpan balik peningkatan kinerja Stasiun KIPM Padang pada periode berikutnya. Keberhasilan pelaksanaan dalam mendukung pengembangan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai di lingkungan Stasiun KIPM Padang dengan semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan melalui peningkatan pemenuhan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.



**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG**

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

## **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Stasiun KIPM Padang dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terpercaya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun KIPM Padang dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Triwulan IV Tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Stasiun KIPM Padang serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja Stasiun KIPM Padang.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## 1.2. Profil Organisasi

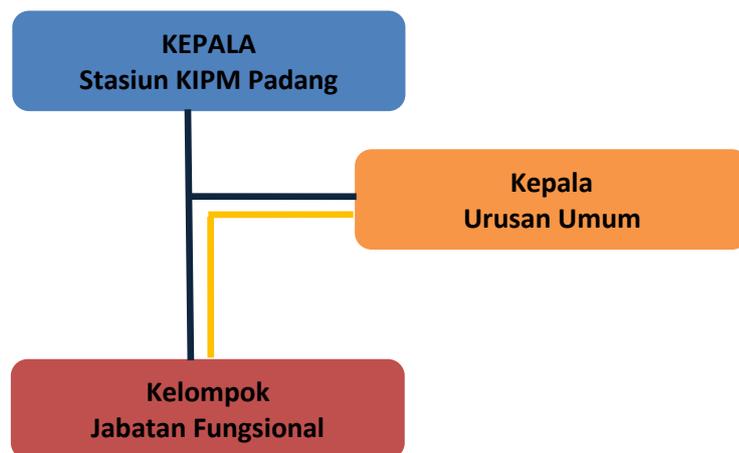
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 90/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Padang yang selanjutnya disebut Stasiun KIPM Padang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dan mempunyai tugas yang sangat strategis, yaitu melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu.

Stasiun KIPM Padang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta penerapan sistem manajemen mutu. Di dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun KIPM Padang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya HPI di Wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan negara tujuan;
3. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa hama dan penyakit ikan;
4. Pelaksanaan pemantauan HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;

5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
6. Pelaksanaan inspeksi terhadap UPI dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
7. Pelaksanaan surveilen HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
8. Pelaksanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;
9. Pelaksanaan pengujian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
10. Penerapan sistem jaminan mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional;
11. Pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK;
12. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
13. Pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga dan tata usaha.

Dalam menjalankan tugasnya, pada awal tahun Tahun 2024 Stasiun KIPM Padang mempunyai pegawai atau sumber daya manusia sebanyak 13 (Tiga belas) orang pegawai baik teknis maupun administrasi yang cukup kompeten dan memadai. Bagan struktur organisasi Stasiun KIPM Padang dapat dilihat dalam Gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Padang

### 1.3. Sistematika dan Penyajian

Sistematika dan isi laporan kinerja Stasiun KIPM Padang Tahun 2024 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, sebagai berikut:

- a. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini menjelaskan gambaran secara ringkas tentang capaian kinerja selama Tahun 2024.
- b. **Bab I – Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.
- c. **Bab II – Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun yang bersangkutan.
- d. **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- e. **Bab IV – Penutup**, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- f. **Lampiran**, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan hal-hal lainnya



**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG**

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Visi dan Misi

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan misi, yakni ***“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”***. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020-2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

## 2.2. Tujuan

Tujuan pembangunan BKIPM merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, telah menetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Stasiun KIPM Padang sebagai UPT BKIPM bertanggung jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu :

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan,serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia,ikan dan lingkungan
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standarisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan
3. Meningkatnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang integratif, serta;
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Stasiun KIPM Padang.

## 2.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada Tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategis, sasaran dan indikator kinerja Stasiun KIPM Padang Tahun 2024 ditunjukkan pada Gambar 2.1. di bawah ini :



Gambar 2.1. Peta Sasaran Strategis SKIPM Padang Tahun 2024

Peta strategis Stasiun KIPM Padang tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam indikator dan target kinerja yang akan dicapai selama Tahun Anggaran 2024 baik dalam satu tahun sekaligus maupun setiap bulannya. Metode penjabaran peta strategis ke dalam indikator kinerja menggunakan metode cascading, dari eselon IV ke Kapala Urusan Umum dan Ketua Tim Kerja hingga seluruh pegawai Stasiun KIPM Padang. Dengan proses cascading tersebut maka strategi organisasi didukung oleh seluruh unit dan pegawai Stasiun KIPM Padang dalam setiap level. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan adalah suatu bentuk keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah direncanakan. Target kinerja Stasiun KIPM Padang Tahun 2024 yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya, telah dirinci ke dalam masing-masing perspektif sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1. Indikator Kinerja dan Target Kinerja SKIPM Padang Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2024
SK 1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70
		3	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	99
SK 2	Terselenggaranya pengendalian sistem dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70
SK 3	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup UPT. Stasiun KIPM Padang	6	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Padang (Indeks)	3,36
		7	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Padang.	86
		8	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	75
		9	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	82
		10	Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	71

	11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	93,76
	12	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	100
	13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	80
	14	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	80
	15	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	80

## 2.4. Pengukuran Kinerja

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi Indikator Kinerja (IK) yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IK, akan diperoleh indeks capaian IK. Penghitungan indeks capaian IK perlu memperhitungkan jenis polarisasi IK yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IK adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a) *Polarisasi Maximize*

Pada polarisasi maximize kriteria nilai terbaik pencapaian IK adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IK} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

b) *Polarisasi Minimize*

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IK adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IK} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})) \times 100\%$$

c) *Polarisasi Stabilize*

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IK adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IK adalah sebagai berikut

<b>SANGAT KURANG</b>	<b>KURANG</b>	<b>CUKUP</b>	<b>BAIK</b>	<b>ISTIMEWA</b>
≤ 50	50 – <70	70 – <90	90 – < 110	110 – 120



**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG**

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

## **BAB III**

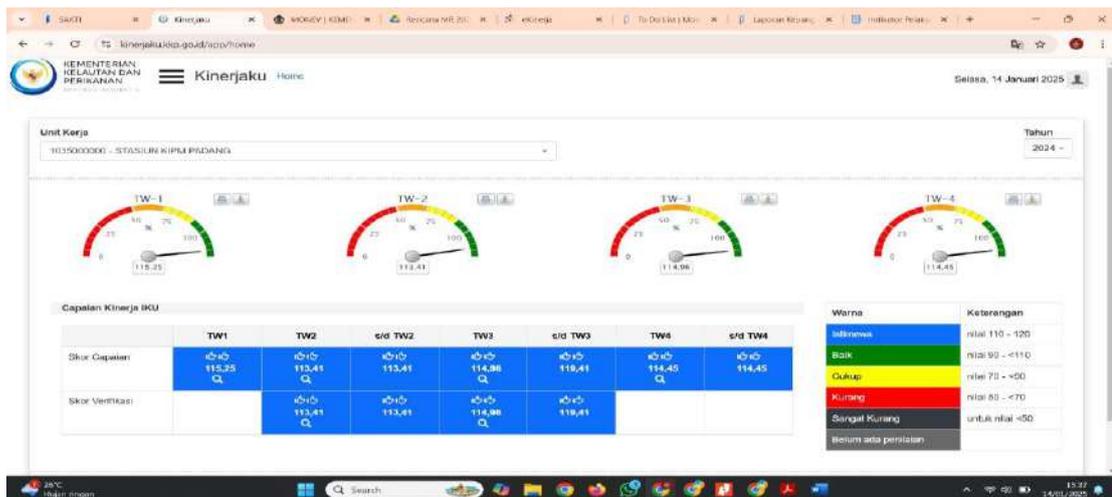
# **AKUNTABILITAS KINERJA**

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

#### 3.1.1. Realisasi Kinerja dibanding Target Tahunan

Secara umum, target-target kinerja pada Tahun 2024 telah tercapai. Berdasarkan dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja di [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id), Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Padang sebesar 114,45% (kategori sangat baik).



Gambar 3.1. Dashboard Nilai Pencapaian Sasaran Strategis pada Aplikasi Kinerjaku KKP Tahun 2024

Nilai pencapaian sasaran strategis tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja pada setiap sasaran strategis berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sekaligus keberhasilan dalam melaksanakan target kinerja program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan BPPMKHP dalam mewujudkan

visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Padang Tahun 2024 untuk setiap sasaran strategis dalam dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja KKP.

NPSS tersebut merupakan kompilasi nilai dari hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja untuk setiap sasaran strategis organisasi. Pengukuran pencapaian indikator kinerja dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya. Ringkasan capaian indikator kinerja Stasiun KIPM Padang Tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.1

*Tabel 3.1. Capaian Kinerja Stasiun KIPM Padang Tahun 2024*

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Target 2024	Realiasi 2024
SK 1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70	100
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70	100
		3	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70	100
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	99	133,5
SK 2	Terselenggaranya pengendalian sistem dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70	83,1



SK 3	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup UPT. Stasiun KIPM Padang	6	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Padang (Indeks)	3,36	4,00
		7	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Padang.	86	87,58
		8	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	75	83,61
		9	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	82	82,80
		10	Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	71	75
		11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	93,76	96,49
		12	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	100	100
		13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	80	100
		14	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	80	84,34
		15	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	80	97,50

**Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan**

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan kegiatan yang

dilaksanakan oleh Stasiun KIPM Padang. Nilai sasaran strategis ini pada Tahun 2024 adalah Baik. Nilai ini diperoleh berdasarkan pencapaian 4 (empat) indikator kinerja yakni :

- 1) Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%);
- 2) Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%);
- 3) Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%); dan
- 4) Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%).

*Tabel 3.2. Capaian Sasaran Kegiatan 1 berdasarkan Indikator Kinerjanya*

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Thd Target Tahunan
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70	100	120
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70	100	120
Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70	100	120
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	99	133,5	120

### **IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang**

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI),
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Adapun cara pengukuran capaian kinerja adalah :

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

- %X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer
- A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB
- B = Persentase Unit menerapkan CPIB
- C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB
- D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB
- E = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
- F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal
- xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)\*

Target Indikator Kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Padang Pada tahun 2024 adalah 70%. Akan tetapi sampai dengan akhir tahun belum terbitnya Organisasi dan Tata Kerja UPT BPPMHKP maka kegiatan sertifikasi di sektor Produksi Primer yang meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan CPIB di Kapal belum dapat dilaksanakan. Namun demikian sebagai langkah persiapan pelaksanaan sertifikasi jaminan mutu hasil perikanan di Sumatera Barat dilakukan kegiatan Sosialisasi dan Verifikasi/Penilaian Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Perikanan.



*Gambar 3.2. Foto Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Perikanan*



Target Indikator Kinerja Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang pada tahun 2024 adalah 70%. Akan tetapi sampai dengan akhir tahun 2024 pada Stasiun KIPM Padang tidak ada pengajuan surat permohonan sertifikasi di sektor Produksi Primer (CBIB, CPIB, CPPIB, CDOIB, CPOIB dan CPIB Kapal). Karena tidak adanya permohonan sertifikasi untuk masing-masing sertifikasi (komponen pembentuk), maka nilai komponen pembentuk yang dijadikan dasar perhitungan capaian indikator kinerja adalah pada kegiatan sebagai berikut :

- A. Sosialisasi sertifikasi jaminan mutu hasil perikanan, dimana kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Perikanan ditargetkan 1 kegiatan dapat terealisasi 1 kegiatan atau 100%, dengan perhitungan :

$$\text{Persentase A} = \frac{\text{Pelaksanaan kegiatan sosialisasi}}{\text{Rencana kegiatan sosialisai}} \times 100\% = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

- B. Verifikasi/Identifikasi sertifikasi jaminan mutu hasil perikanan di kabupaten/kota di Sumatera Barat ditargetkan 6 lokasi terealisasi 6 lokasi kabupaten/Kota yaitu Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Solok, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Agam, dan Kab. Tanah Datar. Dengan demikian kegiatan ini juga tercapai 100% dengan perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Persentase B} &= \frac{\text{Lokasi terverifikasi/teridentifikasi}}{\text{Target lokasi verifikasi/identifikasi}} \times 100\% \\ &= \frac{6}{6} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Berdasarkan 2 (dua) komponen pembentuk tersebut diatas maka capaian IK Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Padang dari target IKK pada Triwulan IV yang ditetapkan 70%, realisasinya 100%, dengan perhitungan :

$$\%X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$$

$$\%X = \frac{100 + 100}{2} \times 100\%$$

$$\%X = 100\%$$

## **IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT lingkup Stasiun KIPM Padang**

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);

3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Adapun cara pengukuran capaian kinerja adalah :

$$\%X = \frac{A + B}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)\*)

Pada tahun 2024 telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penerapan HACCP dengan 5 ruang lingkup, yaitu pada CV. Tor Mahseer Sumatera 1 RL, PT. Dempo Andalas Sumatera 2 RL, PT Lintas Laut Samudera 1 RL. Sehingga target sebanyak 3 (tiga) ruang lingkup dan realisasi 5 (Lima), sehingga capaiannya 167%.

Untuk Sertifikat Kelayakan Pengolahan, terdapat 2 UMKM yang mengajukan permohonan dan telah dilakukan verifikasi yaitu Koperasi pengusaha dan pembudidaya Fish dengan ruang lingkup lele bumbu beku serta Dapur Deni's dengan ruang lingkup Dendeng Ikan, sehingga capaiannya 100%.

Dengan demikian realisasi persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu pangan adalah :

$$\%X = \frac{167 + 100}{2} \times 100\% = 133,5\%$$

Dengan demikian target 70% realisasi 100%, maka capain IK ini adalah 120%

### **IK3. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Padang**

Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai Pengawasan Mutu hasil KP di wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran *marine biotoxin* dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP.

Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini dilakukan di Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar Tradisional, Supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestic. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji Organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan Lokasi wilayah Perairan/Pelabuhan Perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestik yang bebas dari cemaran *marine biotoxin* dan cemaran kimia berbahaya.

Adapun cara pengukurannya adalah :

$$\%X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

- %X = Persentase pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI
- A = Jumlah kab/kota /yang dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI
- B = Jumlah kab/kota/yang ditetapkan untuk dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI

Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik pada Stasiun KIPM Padang tahun 2024 dilakukan dua kali dalam setahun yaitu pada semester dan

semester II di Kabupaten Pasaman dengan lokus Pasar Tradisional Panti, Pasar Tradisional Lubuk Sikaping dan Pasar Tradisional Kumpulan.

Kegiatan yang dilaksanakan sesuai jadwal palang pada bulan Februari 2024 (Triwulan I) telah dilaksanakan kegiatan Pembentukan Tim Daerah Pelaksana Kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Tim Inpres 01/2017) Tahun 2024 dengan melibatkan :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar
2. Balai Besar POM Padang
3. Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pasaman
4. Dinas Kooperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman
5. Satuan Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Padang
6. Perguruan Tinggi (Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Bung Hatta)
7. Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten Pasaman.

Sementara untuk pelaksanaan monitoring ke lapangan tahap I telah dilaksanakan tanggal 6-8 Maret 2024 dan tahap II, pada tanggal 2-4 Oktober 2024.

Rincian lokus dan jenis sampel pada semester I adalah sebagai berikut:

No	Lokus	Jenis sampel
1	Pasar tradisional Kumpulan, Kec Bonjol	Ikan tongkol, Ikan kembung, Ikan tuna, ikan layang, ikan kuwe
2	Pasar tradisional Lubuk Sikaping, Kec Lubuk Sikaping	Ikan pisang-pisang, ikan kembung, ikan barakuda, udang, cumi-cumi
3	Pasar tradisional Panti, Kec Panti	Ikan kembung, ikan makarel, ikan layang, udang, cumi cumi

Rincian lokus dan jenis sampel pada semester II adalah sebagai berikut:

No	Lokus	Jenis sampel
1	Pasar tradisional Kumpulan, Kec Bonjol	Udang, ikan tongkol, ikan slender, ikan layang, Baby tuna.
2	Pasar tradisional Lubuk Sikaping, Kec Lubuk Sikaping	Ikan kuwe, Ikan tenggiri, ikan layang, udang, ikan kembung
3	Pasar tradisional Panti, Kec Panti	Ikan kembung, ikan cakalang, ikan layang, udang, cumi segar

Dengan telah terlaksananya kegiatan pengawasan mutu dan hasil perikanan lingkup Stasiun KIPM Padang tahun 2024 dilaksanakan di satu kabupaten, yaitu Kabupaten Pasaman dari satu kabupaten yang ditetapkan, maka realisasi IK ini adalah 100% dan capainnya 120%.

**IK4. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Padang**

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Cara pengukuran :

$$\%X = \frac{A + B}{A} \times 100\%$$

%X = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan \*)

\*) *Notifikasi Penolakan kasus/penolakan HC mutu dilampirkan*

Tabel 3.3. Ekspor Hasil Perikanan Stasiun KIPM Padang Tahun 2024

Bulan	Negara Tujuan	Frekwensi Ekspor (Jumlah HC terbit)	Jumlah HC yang ditolak
Oktober	Jepang	1	0
November	Dubai Jepang	2	0
Desember	Dubai Jepang	6	0
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>0</b>

Capaian IK Rasio ekspor dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Padang, dihitung menggunakan rumus :

$$\%X = \frac{A+B}{A} \times 100\%$$

$$\%IKU = \frac{9 - 0}{9} \times 100 = 100 \%$$

**Sasaran Kegiatan 2. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar**

Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan oleh Stasiun KIPM Padang. Nilai sasaran strategis ini pada Tahun 2024 adalah Baik. Nilai ini diperoleh berdasarkan pencapaian indikator kinerja yakni: Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%).

Tabel 3.4. Capaian Sasaran Kegiatan 2 berdasarkan Indikator Kinerjanya

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Thd Target Tahunan
Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70	83,10	119

**IK5. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Padang**

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium pengujian yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian (ISO 17025) di laboratorium *official control* yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;

5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum;
2. Persyaratan Struktural;
3. Persyaratan Sumberdaya;
4. Persyaratan Proses;
5. Persyaratan Sistem Manajemen.

Cara pengukuran :

$$\%X = \frac{A + B}{2} \times 100\%$$

%X = Persentase Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi  
A = Presentase Nilai Penerapan ISO 17020  
B = Presentase Penerapan ISO 17025

Pada tahun 2024 ini ditargetkan 70% realisasinya 83.10%. Data tersebut didapatkan dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Pusat Manajemen Mutu.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282  
LAMARAN [www.bppmhp.go.id](http://www.bppmhp.go.id)

Nomor : B.32/BPPMHKP.2/TU.210/IV/2025 10 Januari 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Penyampaian Capaian IKU Sistem  
Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian dan  
Lembaga Inspeksi lingkup UPT BPPMHKP

Yth. Seluruh Kepala UPT BPPMHKP

Sehubungan telah selesainya kegiatan Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan capaian indikator kinerja utama terkait nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi lingkup UPT BPPMHKP, sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium sebesar **81,35** didapatkan dari 13 laboratorium;
2. Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi sebesar **84,85** didapatkan dari 14 lembaga inspeksi;
3. Berdasarkan data pada poin 1 dan poin 2 maka capaian indikator kinerja utama Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT BPPMHKP sebesar **83,10**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Manajemen Mutu



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
2. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Gambar 3.3. Hasil capaian IK Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu

### Sasaran Kegiatan 3. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT Stasiun KIPM Padang

Capaian kinerja BKIPM pada *Learning and Growth Perspective* berasal dari sasaran kegiatan Terselenggaranya Tata kelola Pemerintahan yang Baik lingkup UPT Stasiun KIPM Padang dengan Indikator Kinerja:

- 1) Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Padang (Indeks);
- 2) Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Padang;
- 3) Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai);

- 4) Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai);
- 5) Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai);
- 6) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai);
- 7) Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%);
- 8) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%);
- 9) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun KIPM Padang (%);
- 10) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%).

*Tabel 3.5. Capaian Sasaran Kegiatan 3 berdasarkan Indikator Kinerjanya*

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Thd Target Tahunan
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Padang (Indeks)	3,36	4,00	119
Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Padang.	86	87,58	101
Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	75	83,61	111
Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	82	82,80	101
Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	71	75	106
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	93,76	96,49	103
Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	100	100	100
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	80	100	120
Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	80	84,34	105
Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	80	97,50	120

## **IK6. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Padang**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup UPT Stasiun KIPM Padang menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/ pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/>. Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat diakses oleh pengguna jasa. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner.

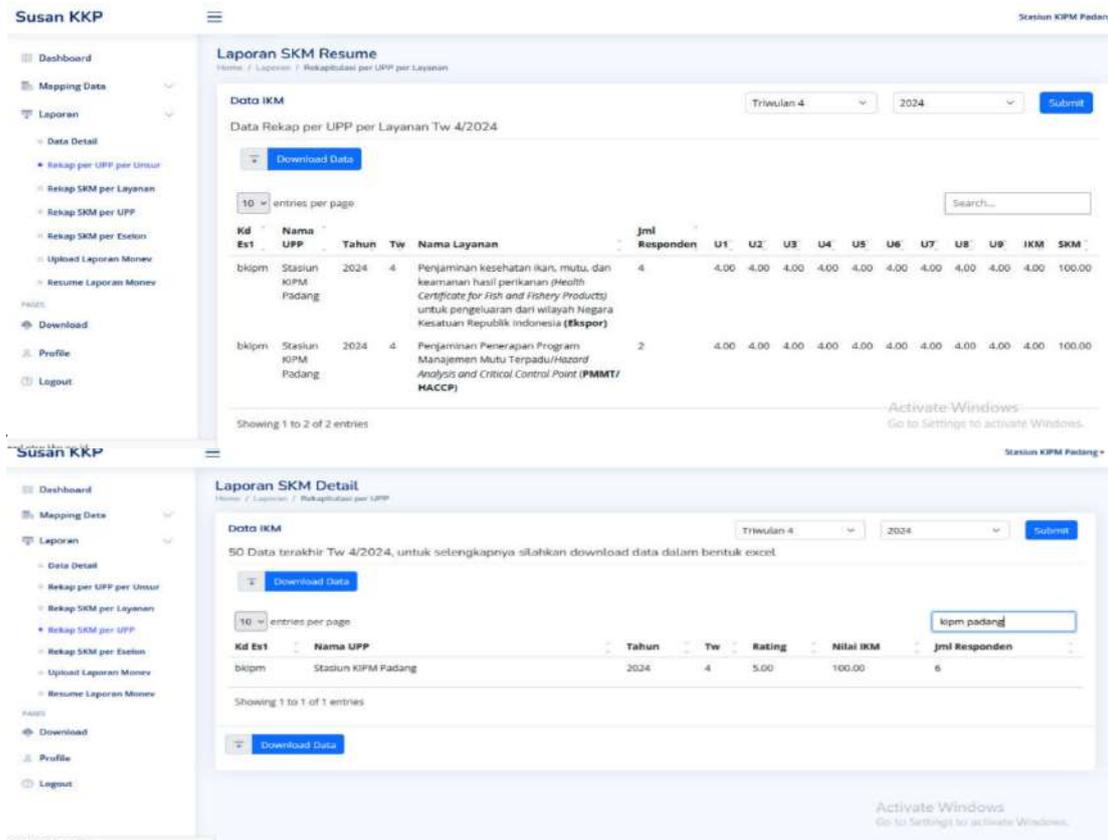
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Pada Tahun 2024 nilai IKM Stasiun KIPM Padang adalah 4 dari target 3,36 yang ditetapkan, hal ini berarti capaian kinerja IK ini adalah 119%.



Gambar 3.4. Nilai SKM Stasiun KIPM Padang Triwulan IV Tahun 2024 pada e-survey SKM BPPMHKP

## IK7. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Padang

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 dimensi meliputi: kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin.

1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi: pendidikan S3, S2, S1, D3, D1, SLTA sederajat.
2. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/ Diklat Teknis, Diklat 20 Jam (JP) satu tahun terakhir, seminar/Workshop/ konferensi/setara satu tahun terakhir.
3. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi SKP dan Prilaku Kerja.
4. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin.

Formulasi menghitung capaian indikator Indeks kompetensi dan integritas BPPMHKP adalah:

$$Indeks = (25 \times A) + (25 \times B) + (25 \times C) + (25 \times D)$$

Keterangan

A : Persentase nilai pejabat yang mengikuti pelatihan

B : Persentase capaian output pegawai pada SKP

C : Persentase tingkat kehadiran pegawai

D : Persentase LHKPN/LHKASN

Untuk Satker Stasiun KIPM Padang ditetapkan target Tahun 2024 sebesar 86. Pengukuran dilakukan pada Semester I dan Semester II, sementara realisasinya berdasarkan data dari Biro SDMA adalah 87,58.



29	STASBUK KIPM PADANG	12	70,67	78,66 %	3732	94,8 %	25	83,33 %	5	100 %	87,58	TINGGI
----	---------------------	----	-------	---------	------	--------	----	---------	---	-------	-------	--------

Gambar 3.5. *Indek IP ASN SKIPM Padang pada Aplikasi Simpeg Biro SDMA-KKP*

### **IK8. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT Stasiun KIPM Padang**

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas 75 pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporannya.

Unit yang diarahkan berpredikat WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan mengacu kepada PermenKP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Nilai minimum untuk berpredikat WBK dicapai dengan evaluasi untuk memperoleh hasil nilai WBK  $\geq 75$  yang terdiri dari: **Nilai Pengungkit** yang diperoleh dari aspek Pemenuhan dan Reform (manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, pelayanan publik) dan **Nilai Hasil** yang diperoleh dari komponen birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Penilaian Unit Kerja di lingkungan BPPMHKP dengan kriteria penilaian sesuai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) secara mandiri dan menggunakan pedoman teknis sesuai dengan Peraturan Irjen KKP Nomor 58/PER-IRJEN/2020 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP.

Cara Pengukurannya :

Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan ZI menuju WBK = **Nilai Pengungkit + Nilai Hasil**

Capaian indikator Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT Stasiun KIPM Padang pada Tahun 2024 didapatkan berdasarkan hasil Pemantauan Penilaian

Mandiri Pembangunan Zona ZI Menuju WBK/WBBM Stasiun KIPM Padang oleh Tim dari Sekretariat BKIPM dimana hasil yang didapat adalah sebagai berikut :

Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan ZI menuju  
**WBK = Nilai Pengungkit + Nilai Hasil = 45,91 + 37,70 = 83,61**

Dengan demikian target indikator kinerja pada Tahun 2024 dengan nilai 75 terealisasi 83,61, sehingga capainnya 111%.

*Tabel 3.6. Hasil Pemantauan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona ZI Menuju WBK/WBBM Stasiun KIPM Padang oleh Tim dari Sekretariat BKIPM*

Area Perubahan		Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	Persentase	Pemenuhan Nilai Min
<b>A. PENGUNGKIT</b>		<b>60.00</b>					
	1. MANAJEMEN PERUBAHAN	8.00	2.30	3.42	5.72	71.48%	OK
	2. PENATAAN TATALAKSANA	7.00	2.47	1.84	4.31	61.55%	OK
	3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10.00	3.78	3.50	7.28	72.78%	OK
	4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	10.00	3.74	4.51	8.24	82.40%	OK
	5. PENGUATAN PENGAWASAN	15.00	5.03	6.88	11.91	79.39%	OK
	6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10.00	4.70	3.76	8.46	84.58%	OK
<b>TOTAL PENGUNGKIT</b>					<b>45.91</b>	<b>76.52%</b>	<b>OK</b>
<b>B. HASIL</b>		<b>40.00</b>					
	<b>I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL</b>	<b>22.50</b>			<b>21.16</b>	<b>94.06%</b>	<b>OK</b>
	a Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17.50			17.41	99.50%	OK
	b Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5.00			3.75	75.00%	OK
	<b>II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA</b>	<b>17.50</b>			<b>16.54</b>	<b>94.50%</b>	
	- Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17.50			16.54	94.50%	OK
<b>TOTAL HASIL</b>					<b>37.70</b>	<b>94.25%</b>	
<b>NILAI EVALUASI ZONA INTEGRITAS</b>					<b>83.61</b>		<b>OK</b>

### **IK9. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Padang**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome.



Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Level II dihitung berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan BPPMHKP.

Cara Pengukurannya :

1. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Level II adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Inspektorat Mitra dari Unit Eselon I
2. Apabila penilaian tidak dilakukan oleh Inspektorat Mitra, maka nilai SAKIP Level II diperoleh melalui Penilaian Mandiri SAKIP oleh Sekretariat BPPMHKP.

Pada Tahun 2024 UPT Stasiun KIPM Padang memiliki target nilai SAKIP sebesar 82. Berdasarkan nilai hasil penilaian mandiri SAKIP Level II yang dikeluarkan oleh Inspektorat Mitra Stasiun KIPM Padang mendapatkan nilai 82,80 (A). Dengan demikian capaian IK ini adalah 101%.

23	BUSKI PM	24.00	27.00	13.50	20.00	84.50	A
24	SKIPM Palembang	24.00	25.20	11.10	22.50	82.80	A
25	SKIPM Bandung	26.10	25.20	12.60	19.75	83.65	A
26	SKIPM Merauke	23.70	23.70	11.10	18.75	77.25	BB
27	SKIPM Pontianak	22.20	25.50	13.50	22.50	83.70	A
28	SKIPM Kendari	24.00	23.70	13.05	20.25	81.00	A
29	SKIPM Batam	25.50	25.50	10.35	21.00	82.35	A
30	SKIPM Padang	19.80	27.00	13.50	22.50	82.80	A

Gambar 3.6. Hasil penilaian mandiri SAKIP Level II oleh Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2024

### IK10. Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Padang

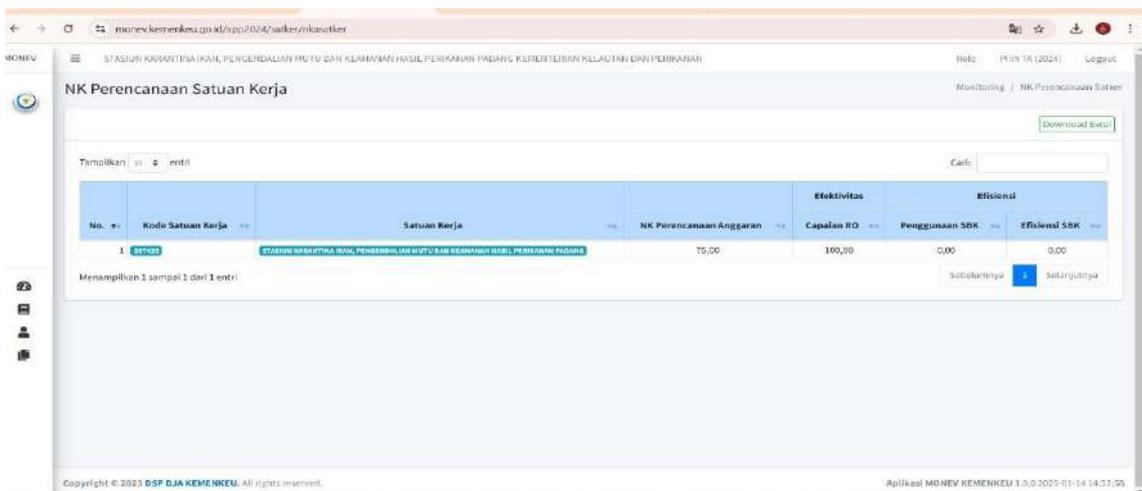
Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan

Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target Akhir Tahun Anggaran 2024 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
2. Baik, apabila NKA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
5. Sangat kurang, apabila NKA ≤ 50

Cara mengukur capaian Indikator Kinerja pada IK ini adalah dengan mengambil data dari Aplikasi MONEV KEMENKEU pada Smart DJA, nilai kinerja pelaksanaan anggaran UPT Stasiun KIPM Padang pada Tahun 2024 adalah 75, melebihi target yang ditetapkan 71, sehingga capaiannya 106%.



No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Capaian RO	Efisiensi SBK
1	25123	STASIUN KAWAHTANSAKAL, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERAKAAN PADANG, KEDIRTERANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	75,00	100,00	0,00	0,00	

Gambar 3.7. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Stasiun KIPM Padang Tahun 2024 pada Aplikasi Monev Kemenkeu - Smart DJA

### **IK11. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Padang**

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Pengukuran capaian kinerja untuk IK Nilai IKPA UPT Stasiun KIPM Padang mengadopsi hasil penilaian yang ada pada **Aplikasi OmSpan** Direktorat Jenderal Anggaran - Kementerian Keuangan. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), yaitu :

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA  $\geq 95$ ;
- b. Baik, apabila  $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$ ;
- c. Cukup, apabila  $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$ ; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA  $> 70$

Target IK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Padang Tahun 2024 ditetapkan 93,76, berdasarkan hasil penilaian yang ada pada **Aplikasi OmSpan** Direktorat Jenderal Anggaran - Kementerian Keuangan, pada Triwulan IV dimana berdasarkan nilai posisi akhir juga merupakan capaian Tahun 2024 pada Stasiun KIPM Padang mendapatkan nilai 96,49, sehingga capaian IK pada Tahun 2024 ini adalah 103%.



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	010	032	567432	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG	Nilai	100.00	86.59	93.53	100.00	100.00	97.98	100.00	96.49	100%	0.00	96.49
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.99	18.71	10.00	10.00	9.80	25.00				
					Nilai Aspek	93.30		97.88			100.00					

Gambar 3.8. Nilai IKPA Stasiun KIPM Padang Tahun 2024 pada Aplikasi OmSpan DJA - Kemenkeu

### IK12. Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Padang

Temuan atas hasil audit pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. LHP BPK merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran pengelolaan keuangan dan kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern.

Pengukurannya :

$$\%X = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi BPK}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan adalah 100%, dimana pada tahun 2024 pada Stasiun KIPM Padang tidak ada pemeriksaan BPK, sehingga realisasi IK ini pada adalah 100%.

*Tabel 3.7. Rekapitulasi Tindak Lanjut Temuan Keuangan LK 2023 Lingkup KKP per 28 September 2024*

No	Eselon I	Nilai Keuangan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Setjen	571,218,613.00	631,793,931,033.00	0.0904%
2	Ditjen PKRL	175,999,847.00	399,297,824,951.00	0.0441%
3	Ditjen PSDKP	1,118,316,959.00	1,119,216,743,475.00	0.0999%
4	Ditjen Perikanan Tangkap	568,110,399.00	842,679,861,445.00	0.0674%
5	Ditjen Perikanan Budidaya	647,733,195.00	1,087,136,906,277.00	0.0596%
6	BPPSDMKP	1,832,712,563.00	1,342,845,268,762.00	0.1365%
7	Ditjen PDSPKP	998,491,792.00	339,604,537,406.00	0.2940%
8	BPPMHKP	11,350,000.00	497,626,943,467.00	0.0023%
9	Itjen	23,878,250.00	75,393,908,501.00	0.0317%
	<b>Jumlah</b>	<b>5,947,811,618.00</b>	<b>6,335,595,925,317.00</b>	<b>0.0939%</b>

*\*) Bagi UPT yang tidak masuk dalam pemeriksaan BPK, maka capainnya 100%*

### **IK13. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Padang**

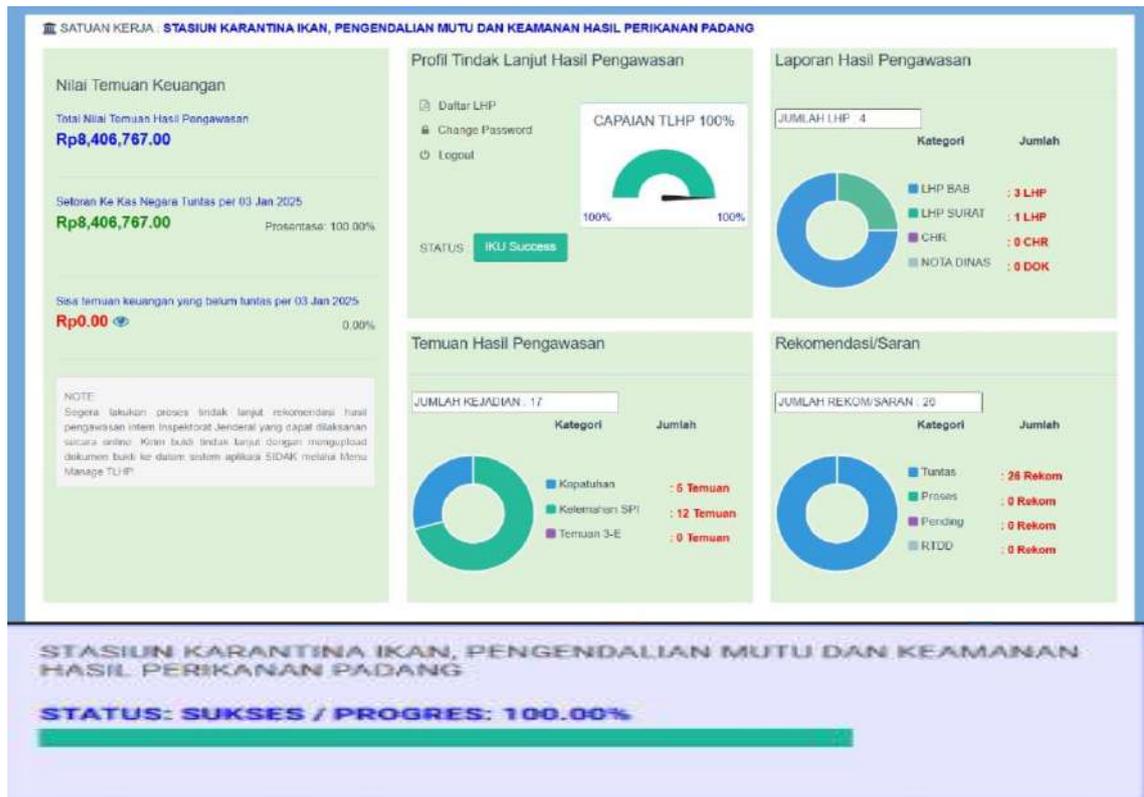
Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP kepada BPPMHKP berdasarkan LHP yang dihitung setiap triwulan yang dapat dilihat pada aplikasi SIDAK. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Stasiun KIPM Padang merupakan persentase perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP dengan rekomendasi hasil pengawasan yang yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT.

Penghitungan capaian :

$$\%X = \frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

- $\sum N_t$  : Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti
- $\sum N$  : Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan

Pada Tahun 2024 target yang ditetapkan adalah 80%. Berdasarkan data aplikasi SIDAK Stasiun KIPM Padang pada akhir tahun 2024 ini telah memanfaatkan seluruh rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP guna perbaikan kinerja UPT. Dengan demikian dari target 80% realisasinya 100% sehingga capaiannya 120%.



Gambar 3.9. Nilai rekomendasai hasil pengawasan Stasiun KIPM Padang Tahun 2024 pada Aplikasi SIDAK

#### **IK14. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Padang**

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa lingkup BPPMHKP sebesar 84,34%. Nilai tersebut melebihi target yang telah ditetapkan pada Triwulan IV yaitu 80. Nilai tersebut diadopsi langsung sebagai capaian kinerja Stasiun KIPM Padang. Rincian penilaian kepatuhan PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2024 dapat dilihat pada table di bawah ini :

*Tabel 3.8. Tingkat Kepatuhan PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2024*

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
1	Ketersediaan Manajemen Risiko PBJ Strategis BPPMHKP	10	10,00
2	Perencanaan dan Persiapan Pengadaan	15	13,75
3	Persentase Pemilihan PBJ yang Dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE)	10	10,00
4	Kesesuaian Tahap Pelaksanaan	45	31,84
5	Laporan Penyelenggaraan PBJ	5	3,75
6	Persentase tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan PBJ lingkup BPPMHKP pada Triwulan I s.d. III Tahun 2023	15	15,00
<b>Hasil Penilaian</b>		<b>100</b>	<b>84,34</b>

### IK15. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Padang

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup BKIPM telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2024 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2024 (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2024 (bobot 20%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Target tingkat kepatuhan pengelolaan BMN SKIPM Padang pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 80%, dan realisasinya 97,50. Nilai realisasi tersebut didapatkan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Unit Eselon I sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup BPPMHKP Tahun 2024

No	Unit Kerja	Target	Tingkat Kepatuhan	Keterangan
1	Pusat Manajemen Mutu	80,00 %	97,50 %	Tercapai
2	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer	80,00 %	97,50 %	Tercapai
3	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen	80,00 %	97,50 %	Tercapai
4	Balai KIPM Jakarta II	80,00 %	97,50 %	Tercapai
5	Balai Uji Standar KIPM	80,00 %	97,50 %	Tercapai
6	Sekretariat BKIPM	80,00 %	97,50 %	Tercapai
7	Stasiun KIPM Bandung	80,00 %	97,50 %	Tercapai
8	Stasiun KIPM Cirebon	80,00 %	97,50 %	Tercapai

9	Balai KIPM Semarang	80,00 %	97,50 %	Tercapai
10	Stasiun KIPM Yogyakarta	80,00 %	97,50 %	Tercapai
11	Balai KIPM Surabaya I	80,00 %	97,50 %	Tercapai
12	Balai KIPM Surabaya II	80,00 %	97,50 %	Tercapai
13	Stasiun KIPM Aceh	80,00 %	97,50 %	Tercapai
14	Balai KIPM Medan I	80,00 %	97,50 %	Tercapai
15	Stasiun KIPM Medan II	80,00 %	97,50 %	Tercapai
16	Stasiun KIPM Tj.Balai Asahan	80,00 %	97,50 %	Tercapai
17	Stasiun KIPM Padang	80,00 %	97,50 %	Tercapai

### 3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja 5 Tahun Terakhir

Tahun 2024 merupakan tahun ke-5 atau tahun terakhir dari Rencana Strategis yang telah disusun oleh Stasiun KIPM Padang yaitu untuk periode Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Selama kurun waktu 5 tahun ada beberapa indikator kinerja mengalami perubahan sejalan dengan perubahan kebijakan dari induk organisasi. Sebagaimana halnya pada tahun 2024 terjadi perubahan induk organisasi dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) menjadi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Perubahan tersebut menyebabkan adanya perubahan tugas dan fungsi pada UPT Stasiun KIPM Padang yang tentunya berdampak pada perubahan beberapa indikator kinerja.

Perubahan tersebut juga menyebabkan capaian indikator kinerja Tahun 2024 tidak semuanya dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun secara umum realisasi kinerja yang telah dicapai selama tahun 2024 pada beberapa indikator kinerja mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Adapun perbandingan realisasi kinerja Stasiun KIPM Padang dalam 5 tahun terakhir (Tahun 2020 s/d 2024) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.8. Perbandingan realisasi kinerja Stasiun KIPM Padang dalam 5 tahun terakhir (Tahun 2020 s/d 2024)

Indikator Kinerja	REALISASI				2024	
	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	--	--	--	--	70	100
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	--	--	--	--	70	100
Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	--	--	--	--	70	100
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	100	100	100	100	99	100
Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	--	--	--	--	70	83,10
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Padang (Indeks)	--	--	3,65	3,81	3,36	4,00
Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Padang.	61,30	81,77	83,71	88,06	86	87,58
Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	--	--	--	--	75	83,61
Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	81	87,65	--	--	82	82,80
Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	--	--	--	--	71	75
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	88	98	98,3	97,85	93,76	96,49
Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	--	--	--	100	100	100

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	100	100	100	100	80	100
Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	--	--	76,21	78,26	80	84,34
Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	--	--	96,20	99,64	80	97,50

### 3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Renstra

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelutan dan perikanan merupakan bagian dari suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan. Untuk lebih mengarahkan pembangunan BPPMHKP, maka Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang telah menyusun Rencana Strategis Stasiun KIPM Padang tahun 2020–2024. Rencana Strategis Stasiun KIPM Padang tahun 2020 – 2024 ini diharapkan penyelenggaraan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.

Capaian indikator kinerja kegiatan selama tahun 2024 telah sejalan dengan Rencana Strategis Stasiun KIPM Padang tahun 2020 – 2024, sebagai dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.11. Perbandingan realisasi kinerja Stasiun KIPM Padang tahun 2024 dengan Renstra

Indikator Kinerja	Tahun 2024		Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	Target	Capaian %
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70	100	70	120
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70	100	70	120
Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70	100	70	120
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	99	133,5	99	120
Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70	83,10	70	119
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Padang (Indeks)	3,36	4,00	3,36	119
Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Padang.	86	87,58	86	101
Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	75	83,61	75	111
Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	82	82,80	82	101
Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	71	75	71	106
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	93,76	96,49	93,76	103
Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	100	100	100	100
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	80	100	80	120

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	80	84,34	80	105
Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	80	97,50	80	120

### 3.1.4. Analisa Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

Secara umum, target-target kinerja pada Tahun 2024 telah tercapai. Berdasarkan dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja di [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id), Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Padang sebesar 114,45% (kategori sangat baik). Nilai pencapaian sasaran strategis tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja pada setiap sasaran strategis berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sekaligus keberhasilan dalam melaksanakan target kinerja program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan BPPMKHP dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Padang Tahun 2024.

Faktor penyebab keberhasilan capaian kinerja untuk IK Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang mencapai 120% adalah karena kinerja dari Inspektur Mutu yang ada pada Stasiun KIPM Padang serta kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Perikanan. Keberhasilan ini juga karena adanya koordinasi yang baik antara Stasiun KIPM Padang dengan instansi terkait di Provinsi Sumatera Barat maupun ditingkat Kabupaten/Kota dan penyuluh perikanan.

Faktor penyebab keberhasilan IK Indeks kepuasan masyarakat layanan UPT Stasiun KIPM Padang mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, tindak terlepas dari baiknya pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa oleh personil SKIPM Padang selama ini. Stasiun KIPM Padang dalam memberikan

pelayan kepada pengguna jasa/masyarakat senantiasa mengacu kepada Keputusan Kepala BKIPM Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Pada Sasaran Program 3 yaitu Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT Stasiun KIPM Padang faktor penyebab keberhasilan capaian IK adalah adanya upaya dalam pemeliharaan dan meningkatkan kompetensi ASN melalui pendidikan/pelatihan/ bimtek/webinar dan lainnya yang dilaksanakan secara daring maupun tatap muka langsung. Dengan meningkatnya kompetensi ASN diharapkan target Nilai Indek Profesionalisme ASN dapat tercapai, sekaligus juga penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan juga jauh lebih baik.

### 3.1.5. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

#### A. Analisa efisiensi penggunaan anggaran

Pengukuran efisiensi pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut, efisiensi anggaran dipandang perlu untuk dilakukan dan dihitung dengan menggunakan formulasi sesuai PMK nomor 214 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum(\text{PAKi} \times \text{CAKi}) - \text{RAKi}}{\sum(\text{PAKi} \times \text{CAKi})} \times 100\%$$

Keterangan :

E	=	Efisiensi
PAKi	=	Pagu anggaran keluaran
RAKi	=	Realisasi anggaran keluaran
CAKi	=	Capaian keluaran

Stasiun KIPM Padang pada Tahun 2024 total Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 4.353.749.000,- mampu menyerap anggaran sebesar Rp. 4.100.391.998,- atau sebesar 94,18%, sementara capaian kinerja 114,45 (1,14). Dengan formulasi tersebut diperoleh angka efisiensi anggaran :

$$E = \frac{\sum(4.353.749.000 \times 1,14) - 4.100.391.998}{\sum(4.353.749.000 \times 114,15)} \times 100\%$$

$$E = \frac{\sum(862.881.862)}{\sum(4.963.273.860)} \times 100\%$$

$$E = 17,39\%$$

Selanjutnya melakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antar 0% sampai dengan 100%, dengan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)\%$$

$$NE = 50\% + 43,4\% = 93,40\%$$

*Tabel 3.12. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2024*

Satuan Kerja	Realisasi Anggaran	Capaian Keluaran	Efisiensi (%)	Nilai Efisiensi	Katagori
Stasiun KIPM Padang	94,18	114,45	17,39	93,40	Sangat Efisien

## **B. Analisa efisiensi penggunaan sumber daya manusia**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Stasiun KIPM Padang membutuhkan SDM dengan latar belakang pendidikan yang mendukung dalam pelaksanaan kerja di bidang teknis dan administrasi. Berdasarkan data kepegawaian tahun 2024, kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Stasiun KIPM Padang dapat terdiri dari 13 orang Pegawai Negeri Sipil (ASN) dan 8 orang Tenaga Kontrak. Dari total 13 orang Pegawai Negeri Sipil (ASN) terdiri dari Pejabat Struktural dan

Kelompok Jabatan Fungsional. Pada analisis efisiensi sumber daya manusia pada pencapaian kinerja Tahun 2024 terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok fungsional yang kini melaksanakan kegiatan dari perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi, perlu didukung dengan ketersediaan SDM yang cukup dan berkualitas. Penambahan SDM khususnya Inspektur Mutu diperlukan, agar dapat mendukung tugas dan fungsi penyelenggaraan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

*Tabel 3.13. Keadaan Pegawai Negeri Sipil SKIPM Padang pada Tahun 2024*

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Plt. Kepala SKIPM Padang/ Kaur Umum	1
2	Inspektur Mutu Hasil Perikanan	5
3	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan	1
4	Fungsional Umum	4
5	Pranata Komputer	1
6	P3K	1
	<b>TOTAL JUMLAH</b>	<b>13</b>

Pada laporan kinerja Tahun 2024 Stasiun KIPM Padang, dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja, ada beberapa analisis efisiensi penggunaan sumber daya lainnya internal dan eksternal, dengan cara:

1. Memaksimalkan peran serta Pegawai Negeri Sipil (ASN) dan Tenaga Kontrak yang ada melalui peningkatan kompetensi dan pengaturan pembagian tugas dan tanggung jawab;
2. Memaksimalkan peran serta instansi terkait khususnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup KKP yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Badan POM serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan;

3. Memaksimalkan peran serta perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi usaha di bidang perikanan serta para pengguna jasa dalam ikut menunjang dan mensosialisasikan pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan.

### **3.1.6. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Stasiun KIPM Padang terdapat dua program yang merupakan cascading dari Unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan. Program tersebut yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen. Pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri terdapat dua kegiatan yaitu Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan serta Kegiatan Manajemen Mutu. Sementara pada Program Dukungan Manajemen terdapat satu kegiatan yaitu Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2024 ini berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja IK yang ada pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri maupun Program Dukungan Manajemen dapat mencapai target bahkan beberapa IKK capaiannya melebihi target (capaian IKK >100%). Keberhasilan capaian kinerja IKK pada Program Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri tidak terlepas dari Capaian kinerja IK pada Program Dukungan Manajemen, begitu juga sebaliknya.

Capaian IK pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yang capainnya 120% yaitu IK 2 : Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang, karena ditunjang oleh Program Dukungan Manajemen berupa pengelolaan dan penyediaan ASN yang professional, penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan anggaran yang baik. Begitu juga sebaliknya capaian IK

pada Program Dukungan Manajemen sebagaimana terlihat pada IK 12: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Stasiun KIPM Padang capaian 120, karena kegiatan pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dilaksanakan dengan baik sesuai rencana aksi.

### 3.2. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan kegiatan di Stasiun KIPM Padang Tahun 2024 tidak terlepas dari anggaran sebagai penggerak yang mendukung terselenggaranya kegiatan untuk melaksanakan kinerja yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Padang. Secara keseluruhan pada tahun 2024 Stasiun KIPM Padang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.353.749.000, berdasarkan DIPA Nomor: SP DIPA-032.13.2.567432/2023 tanggal 30 November 2023. SP DIPA-032.13.2.567432/2023.

Stasiun KIPM Padang telah melaksanakan kegiatan pada Tahun 2024 sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia dengan realisasi sebagai berikut:

*Tabel 3.14. Realisasi Anggaran Stasiun KIPM Padang Tahun Anggaran 2024*

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp)	Ralisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	236.000.000	198.710.494	84,20
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian sistem dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	121.000.000	100.444.380	83,01
SK4.1	Terselenggaranya Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup Stasiun KIPM Padang	3.996.749.000	3.801.237.124	95,12
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>	4.353.749.000	4.100.391.998	94,18%

Stasiun KIPM Padang pada Tahun 2024 mampu menyerap anggaran sebesar Rp.4.100.391.998,- atau sebesar 94,18% dari total Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp.4.353.749.000,-.



**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG**

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**BAB IV**

**PENUTUP**

## **BAB IV P E N U T U P**

Pengukuran capaian kinerja di Stasiun KIPM Padang dilakukan terhadap 2 Sasaran Program, 3 Sasaran Kegiatan dan 15 Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan. Secara umum, pencapaian target indikator Stasiun KIPM Padang telah sesuai dengan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja pada Tahun 2024 seluruh target telah tercapai dengan baik, bahkan ada beberapa IK capaiannya melebihi target. Namun demikian tetap diperlukan upaya dan dukungan, baik internal maupun eksternal untuk mendukung capaian kinerja tahunan.



**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG**

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN  
HASIL PERIKANAN PADANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ivonila Etris**  
Jabatan : **Plt. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**  
Jabatan : **Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan  
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan  
Perikanan

**Ishartini**

Pihak Pertama

Plt. Kepala Stasiun Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil  
Perikanan Padang

**Ivonila Etris**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN**  
**HASIL PERIKANAN PADANG**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70
		3.	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	99
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70
SK.3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT Stasiun KIPM Padang	6.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Padang (Indeks)	3,36
		7.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Indeks)	86
		8.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	75
		9.	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	82
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	71
		11.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	93,76
		12.	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	100
		13.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	80
		14.	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	80
		15.	Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	80

## Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	236.000.000
2.	Manajemen Mutu	366.000.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2024	3.970.549.000
<b>Total Anggaran Stasiun KIPM Padang Tahun 2024</b>		<b>4.572.549.000</b>

Jakarta, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua  
Kepala Badan Pengendalian dan  
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan  
Perikanan



**Ishartini**

Pihak Pertama  
Plt. Kepala Stasiun Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu dan Keamanan  
Hasil Perikanan Padang



**Ivonila Etris**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) EMAIL [setban.bkipm@kkp.go.id](mailto:setban.bkipm@kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ivonila Etris**  
Jabatan : **Plt. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**  
Jabatan : **Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Januari 2024

Pihak Kedua

Plt. Kepala Badan Pengendalian dan  
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan  
Perikanan

**Ishartini**

Pihak Pertama

Plt. Kepala Stasiun Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil  
Perikanan Padang

**Ivonila Etris**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL**  
**PERIKANAN PADANG**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
<b>Kegiatan 1. Pengendalian Mutu</b>				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)	3
		2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi)	1
		3	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Produk)	3
		4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (UPI)	2
		5	UPI Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang Menerapkan Sistem Treceability (UPI)	2
<b>Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan</b>				
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	6	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Padang (nilai)	84
		7	Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Integrasi (Lembaga)	1
		8	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Lokasi)	1
<b>KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM</b>				
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	9	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Indeks)	84
		10	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun KIPM Padang (Nilai)	85
		11	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Padang (%)	100
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Stasiun KIPM Padang (%)	75
		13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	93,75
		14	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	86
		15	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Padang (%)	77,5
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Padang (%)	77,5

## Data Anggaran

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	<b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengendalian Mutu</b>	<b>145.500.000</b>
	Pengendalian Mutu	145.500.000
2.	<b>Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b>	<b>526.500.000</b>
	Standarisasi Sistem dan Kepatuhan	526.500.000
3.	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>3.981.536.000</b>
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM	3.981.536.000
<b>Total Anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang Tahun 2023</b>		<b>4.653.536.000</b>

Jakarta, 16 Januari 2024

Pihak Kedua

Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Ishartini

Pihak Pertama

Plt. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang



Ivonila Etris







# **SKIPM PADANG**